



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348 Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110

Nomor : 1712/SEK/KP3.4.3/VII/2026
Sifat : Terbatas
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Hasil Uji Kelayakan Evaluasi
Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan
predikat kinerja "Sangat Baik"

Jakarta, 24 Juli 2026

Yth. 1. Panitera Mahkamah Agung;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
4. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.

di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Ketentuan penetapan predikat kinerja pegawai pada evaluasi kinerja periodik dan tahunan bagi aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, bersama ini disampaikan hasil uji kelayakan yang dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja Mahkamah Agung bagi aparatur yang mengajukan penilaian kinerja dengan predikat "sangat baik" periode Triwulan II Tahun 2026 (*daftar nama terlampir*). Hasil uji kelayakan ini menguji inovasi dan pencapaian kinerja pegawai yang berdampak secara signifikan bagi organisasi serta mampu menerapkan indikator perilaku kerja bagi diri sendiri dan orang lain di lingkungan kerjanya.

Sebagai tindak lanjut dari hasil uji kelayakan tersebut, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil uji kelayakan wajib disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan dan atasan langsung/pejabat penilai kinerja.
2. Pegawai yang uji kelayakannya **disetujui** untuk mendapatkan predikat kinerja "Sangat Baik", wajib melanjutkan keberlangsungan inovasi yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target organisasi.
3. Pimpinan satuan kerja dan/atau atasan langsung/pejabat penilai kinerja bagi pegawai sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas, wajib mendukung dan membina pegawai dimaksud dalam mengimplementasikan inovasi yang dilakukan di satuan kerjanya.



4. Pegawai yang uji kelayakannya **tidak disetujui** untuk mendapatkan predikat kinerja “Sangat Baik” dan tidak mengajukan uji kelayakan, atasan langsung/pejabat penilai kinerja **wajib** mengubah predikat kinerja pegawai yang bersangkutan menjadi “Baik”.
5. Hasil penilaian kinerja digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kinerja serta kompetensi pegawai.
6. Penyampaian *evidence* kinerja dan perilaku kerja yang disampaikan untuk uji kelayakan, wajib disampaikan secara komprehensif dan menggambarkan dampak yang signifikan bagi organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Inovasi yang telah disetujui pada periode sebelumnya, tidak dapat digunakan untuk uji kelayakan pada periode penilaian berikutnya.
8. Pembukaan penilaian periode penilaian evaluasi kinerja triwulan II sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas, akan dibuka selama 3 hari sejak tanggal surat ini dan akan dimonitoring oleh Biro Kepegawaian Mahkamah Agung.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris Mahkamah Agung,



Sugiyanto

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
3. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung.



DAFTAR PENETAPAN AKHIR TIM PENILAI KINERJA PEJABAT FUNGSIONAL YANG MENGAJUKAN PENILAIAN TRIWULAN II SANGAT BAIK

NO	NAMA PEGAWAI	NIP	JABATAN	SATUAN KERJA	Saran Penetapan akhir tim penilai kinerja	Alasan
1	Dhanang Nurkusuma, S.Kom.	199606092020121009	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo	Tidak Disetujui (Baik)	Tidak mencantumkan bukti dukung terkait dampak penerapan aplikasi terhadap kinerja organisasi
2	Endah Rosmala Dewi, S.Si	198407152009042008	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	Pengadilan Agama Baturaja	Acc	
3	Muhammad Faizal Ashar, S.Kom.	199604102020121009	Pranata Komputer Ahli Pertama	Mahkamah Syar'iyah Langsa	Tidak Disetujui (Baik)	Tidak mencantumkan bukti dukung terkait dampak penerapan aplikasi dan perilaku kerja serta integritas pegawai yang bersangkutan terhadap kinerja organisasi
4	Didik Wahyu Saputra, S.T.	199510292020121002	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pengadilan Agama Tuban	Tidak Disetujui (Baik)	Tidak mencantumkan bukti dukung terkait dampak penerapan aplikasi dan perilaku kerja serta integritas pegawai yang bersangkutan terhadap kinerja organisasi
5	Chandra Komara, S.Kom	198507102015031001	Pranata Komputer Ahli Muda	Pengadilan Agama Sidoarjo	Tidak Disetujui (Baik)	Tidak mencantumkan dokumen usulan dari Pimpinan Satuan Kerja
6	Robi Jefferson, S.Kom.	199306142020121005	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pengadilan Negeri Manado	Tidak Disetujui (Baik)	Tidak mencantumkan bukti dukung terkait dampak penerapan aplikasi dan perilaku kerja serta integritas pegawai yang bersangkutan terhadap kinerja organisasi
7	Khulafi Ahdian, S.T.	199408012020121010	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pengadilan Agama Curup	Tidak Disetujui (Baik)	Tidak mencantumkan bukti dukung terkait dampak penerapan aplikasi dan perilaku kerja serta integritas pegawai yang bersangkutan terhadap kinerja organisasi
8	Rofi Febri Rusbianto, S.Kom	199502072021011001	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pengadilan Agama Fakfak	Acc	
9	Herwina Perianti Hadi, S.H.,M.H	199102032012122001	Analisis Pengelolaan Keuangan APK APBN Ahli Muda	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Tidak Disetujui (Baik)	Tidak mencantumkan bukti dukung terkait dampak penerapan aplikasi dan perilaku kerja serta integritas pegawai yang bersangkutan terhadap kinerja organisasi
10	Dodon Angin Wiyono, S.Kom	198708192020121002	Pranata Komputer Ahli Pertama	Direktorat Jederal Badan Peradilan Umum	Tidak Disetujui (Baik)	Evidence menjelaskan adanya pengembangan SIPP untuk mendukung penanganan perkara Kepailitan dan PKPU, pengembangan fitur Persidangan Tepat Waktu dan Humanis (PATUH) pada aplikasi SIMETRI, serta pengembangan eRATERANG versi 2 yang terintegrasi dengan basis data nasional SIPP. Akan tetapi, pengembangan tersebut merupakan kelanjutan (ongoing development) dari sistem informasi nasional yang telah lama dikembangkan dan diimplementasikan, sehingga belum dapat dikategorikan sebagai inovasi baru atau terobosan yang lahir pada periode penilaian Triwulan II Tahun 2026.

11	Azmi Thoyib, M.Kom.	199504112020121010	Pranata Komputer Ahli Pertama	Mahkamah Syar'iyah Aceh	Tidak Disetujui (Baik)	Tidak mencantumkan bukti dukung terkait dampak penerapan aplikasi dan perilaku kerja serta integritas pegawai yang bersangkutan terhadap kinerja organisasi
12	Septiano Praditya Hartono, S.Kom.	199709192020121005	Pranata Komputer Ahli Pertama	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Tidak Disetujui (Baik)	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap evidence yang diajukan, Tim Penilai Kinerja menilai bahwa uraian capaian yang disampaikan masih bersifat deskriptif mengenai pelaksanaan program dan pengembangan sistem, serta belum menunjukkan kontribusi individual yang menghasilkan kinerja melampaui ekspektasi sebagaimana dipersyaratkan untuk predikat Sangat Baik
13	FHATMI HADDIA PUTRI, S.KOM	198911162015032003	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Tidak Disetujui (Baik)	1. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi bukti dukung, Tim Penilai Kinerja menilai bahwa evidence yang diajukan berupa pengembangan inovasi "Satu Data Ditbinganis" belum memenuhi kriteria untuk mendukung pemberian predikat Sangat Baik pada Evaluasi Kinerja Triwulan II. Inovasi dimaksud bertujuan mengintegrasikan data pembinaan hakim dan tenaga teknis ke dalam satu sistem terpusat sebagai upaya mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Namun demikian, berdasarkan bukti yang disampaikan, capaian kegiatan masih berada pada tahap Analisis Kebutuhan Sistem (System Requirement Analysis) yang meliputi identifikasi proses bisnis, inventarisasi sumber data, analisis kebutuhan pengguna, serta penyusunan spesifikasi kebutuhan sistem. Tahapan tersebut merupakan bagian dari proses perencanaan dan analisis pengembangan sistem, sehingga belum menghasilkan output yang telah diimplementasikan maupun outcome yang memberikan nilai tambah nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi. Sampai dengan akhir Triwulan II, belum terdapat bukti bahwa aplikasi telah selesai dikembangkan, digunakan oleh pengguna, menghasilkan peningkatan kualitas layanan, efisiensi proses bisnis, percepatan pengambilan keputusan, atau dampak strategis lainnya. 2. Sesuai Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026, usulan Penilaian tidak relevan antara indikator kinerja dengan tugas jabatan

14	Tita Sri Handayani	199505262020122006	Pranata Komputer	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Tidak Disetujui (Baik)	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap evidence yang diajukan, Tim Penilai Kinerja menilai bahwa uraian capaian yang disampaikan masih bersifat deskriptif mengenai pelaksanaan program dan pengembangan sistem, serta belum menunjukkan kontribusi individual yang menghasilkan kinerja melampaui ekspektasi sebagaimana dipersyaratkan untuk predikat Sangat Baik
15	Arief Kusuma Putra, S.Kom., M.Kom	199011102020121007	Pranata Komputer Ahli Pertama	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	Tidak Disetujui (Baik)	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap evidence yang diajukan, Tim Penilai Kinerja menilai bahwa uraian capaian yang disampaikan masih bersifat deskriptif mengenai pelaksanaan program dan pengembangan sistem, serta belum menunjukkan kontribusi individual yang menghasilkan kinerja melampaui ekspektasi sebagaimana dipersyaratkan untuk predikat Sangat Baik
16	Agustinus Evan Bangun Merdhiko, S. Kom.	198508182020121004	Pranata Komputer Ahli Pertama	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Tidak Disetujui (Baik)	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap evidence yang diajukan, Tim Penilai Kinerja menilai bahwa uraian capaian yang disampaikan masih bersifat deskriptif mengenai pelaksanaan program dan pengembangan sistem, serta belum menunjukkan kontribusi individual yang menghasilkan kinerja melampaui ekspektasi sebagaimana dipersyaratkan untuk predikat Sangat Baik
17	Ahmad Bustomil Karim, A.Md.A.B.	199708202020121004	Arsiparis Terampil	Pengadilan Agama Baturaja	Tidak Disetujui (Baik)	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap evidence yang diajukan, Tim Penilai Kinerja menilai bahwa inovasi "Database Berkas Perkara Tahun 1996–2015" belum dapat dijadikan dasar pemberian predikat Sangat Baik pada penilaian kinerja Triwulan II. Evidence menjelaskan bahwa aplikasi dibangun untuk melengkapi data perkara yang belum terdigitalisasi dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sehingga memudahkan pencarian arsip perkara. Namun demikian, bukti yang disampaikan masih berupa uraian manfaat yang bersifat naratif dan belum didukung data objektif yang memadai untuk menunjukkan bahwa inovasi tersebut telah menghasilkan kinerja yang melampaui ekspektasi sebagaimana dipersyaratkan dalam Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026.
18	Fajar Andhika Suwanto Putra, A.Md.	199404072020121009	Operator - Teknisi Sarana dan Prasarana	Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo	Tidak Disetujui (Baik)	Tidak mencantumkan bukti dukung yang relevan terkait dampak penerapan aplikasi terhadap kinerja organisasi

19	T. Samsul Bahri, S.Kom., S.H., M.H.	198807252015031003	Panitera Muda Pidana	Pengadilan Negeri Banda Aceh	Tidak Disetujui (Baik)	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap evidence yang diajukan, Tim Penilai Kinerja menilai bahwa uraian capaian yang disampaikan masih bersifat deskriptif mengenai pelaksanaan program dan pengembangan sistem, serta belum menunjukkan kontribusi individual yang menghasilkan kinerja melampaui ekspektasi sebagaimana dipersyaratkan untuk predikat Sangat Baik
20	Dr. Muhamad Wakhid, S.E., S.H., M.M., M.H.	197712132009011003	Kepala Subbagian Perlengkapan	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Tidak Disetujui (Baik)	Tidak mencantumkan bukti dukung yang relevan terkait kinerja yang dinilai diatas ekspektasi
21	NISA TUNJUNG HAPSARI	199008242015032004	Kepala Sub Bagian Akuntansi	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Tidak Disetujui (Baik)	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap evidence yang diajukan, Tim Penilai Kinerja menilai bahwa uraian capaian yang disampaikan masih bersifat deskriptif mengenai pelaksanaan program dan pengembangan sistem, serta belum menampilkan <i>outcome</i> yang berimplikasi pada <i>stakeholder</i> .
22	Nenny Isfiany Sitohang	198704162006042001	Kepala Subbagian Ketatalaksanaan	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Tidak Disetujui (Baik)	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap evidence yang diajukan, Tim Penilai Kinerja menilai bahwa uraian capaian yang disampaikan masih bersifat deskriptif mengenai pelaksanaan program dan pengembangan sistem, serta belum menunjukkan kontribusi individual yang menghasilkan kinerja melampaui ekspektasi sebagaimana dipersyaratkan untuk predikat Sangat Baik
23	Latif Usman, S.S.T.Ars.	199201062020121006	Arsiparis Terampil	Pengadilan Agama Kota Malang	Tidak Disetujui (Baik)	Melebihi batas waktu pengajuan
24	Fitra Widiyawati,S.S.T.Ars	198908242020122004	Arsiparis Ahli Pertama	Pengadilan Negeri Purwokerto	Tidak Disetujui (Baik)	Melebihi batas waktu pengajuan
25	Julius Siberium Timbung, S.E.	19820715206041003	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	Tidak Disetujui (Baik)	Melebihi batas waktu pengajuan
26	Roberto Asintongan P., S.Kom.	198802062019031003	Pranata Komputer Mahir	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	Tidak Disetujui (Baik)	Melebihi batas waktu pengajuan
27	Yogi Nugraha Putra, S.Kom.	199409182019031009	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	Tidak Disetujui (Baik)	Melebihi batas waktu pengajuan
28	Hanum Shirotu Nida, S.Kom., M.Han.	199409182020122007	Pranata Komputer	Pengadilan Agama Kabupaten Malang	Tidak Disetujui (Baik)	Melebihi batas waktu pengajuan